



FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA KECURANGAN (*FRAUD*) DI SEKTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN KLATEN

Yanita Maya Adinda[✉], Sukardi Ikhsan

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Juni 2015
Disetujui Juli 2015
Dipublikasikan Agustus 2015

Keywords:
Fraud; Perception;
Government Sector

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji persepsi pegawai negeri di instansi pemerintahan Kabupaten Klaten tentang pengaruh keefektifan pengendalian internal, kultur organisasi, kesesuaian kompensasi, penegakan peraturan, keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi terhadap kecurangan *fraud* di sektor pemerintahan. Sampel penelitian ini terdiri dari 200 pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan Kabupaten Klaten. Kuesioner yang memenuhi syarat adalah 150 responden. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan analisis full model *Structural Equation Modeling (SEM)* dengan alat analisis *smartPLS*. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh negatif antara keefektifan pengendalian internal, kultur organisasi, keadilan prosedural, dan komitmen organisasi dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif antara keadilan distributif dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh antara kesesuaian kompensasi dan penegakan peraturan dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel penelitian.

Abstract

The purpose of this study was to examine the perception of civil servants in Klaten Regency on the influence of internal control effectiveness, organizational culture, compensation compliance, enforcement regulations, procedural justice, distributive justice, organizational commitment towards fraud in the Government sector. This research sample consisted of 200 employees who work in Klaten Regency. The qualified respondents consist of 200 questionnaire. Data analysis using Structural Equation Modeling (SEM) with smartPLS analysis tool. The results showed negative influence of internal control effectiveness, organizational cultures procedural justice, and organizational commitment with fraud in the Government sector, there is a positive influence among justice distributive with fraud in the government sector, there was no influence compliance compensation and enforcement regulatory compliance with fraud in the government sector. For further research are expected to expand the research variable.

© 2015 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:
Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: fe@unnes.com

PENDAHULUAN

Kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok secara sengaja yang berdampak dalam laporan keuangan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi entitas atau pihak lain. Albrecht (2003) mendefinisikan *fraud* sebagai representasi tentang fakta material yang palsu dan sengaja atau ceroboh sehingga diyakini dan ditindaklanjuti oleh korban dan kerusakan korban.

Pemerintahan sebagai pengembalian kepercayaan dari masyarakat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, salah satunya adalah memastikan bahwa keuangan negara dikelola dengan baik dan *accountable*. Namun pada pelaksanaannya banyak terjadi praktek *fraud* yang secara langsung dapat merugikan negara dan secara tidak langsung dapat merugikan masyarakat. Maraknya pengungkapan praktek-praktek *fraud* terutama korupsi dipemerintahan menunjukkan dua sisi realitas pelaksanaan pemerintahan.

Teori Atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan sesuatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Dalam membuat penilaian terhadap orang lain, persepsi akan dikaitkan dengan teori atribusi. Sedangkan teori *Fraud Triangle* yang dikembangkan oleh Cressey (1953), mengatakan bahwa *fraud* disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) *Pressure* atau tekanan, (2) *Oportunity* atau kesempatan, (3) *Rationalization* atau pembenaran.

Tindak kecurangan di pemerintahan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Bahkan dalam dasawarsa terakhir pemerintah telah membentuk dan memberdayakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun sayangnya hasil yang di dapat masih belum sesuai dengan harapan, di mana Indonesia masih menduduki 10 negara terkorup di dunia.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 21 kasus dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian daerah Kabupaten Klaten. Namun sebanyak 13 kasus dari 21 kasus temuan BPK belum ditindaklanjuti. Total nilai kerugian pemerintah daerah terkait 21 kasus tersebut merugikan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten itu total senilai Rp3,9 miliar. (Merdeka.com:Senin 2 April 2012).

Penelitian Najahningrum (2013) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada dinas DIY, dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, keadilan distributif, keadilan prosedural, budaya etis manajemen, komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud* dan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap *fraud*. Pramudita (2013) melakukan penelitian pada pemerintahan Kabupaten Salatiga, hasilnya menunjukkan gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya etis berpengaruh negatif terhadap *fraud* sedangkan komitmen organisasi dan penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Sedangkan penelitian Kusumastuti (2012) menunjukkan bahwa faktor keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan moralitas manajemen berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Banyak kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Klaten, maka peneliti memilih Kabupaten Klaten sebagai obyek penelitian. Selain itu, belum adanya penelitian mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) di Dinas Pemerintah Kabupaten Klaten sehingga penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dengan obyek yang berbeda.

Wilopo (2006), sistem pengendalian internal bagi sebuah organisasi

sangatlah penting, yaitu untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan.

H1: Keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud)

Kultur organisasi yang baik tidak akan membuka peluang sedikitpun bagi individu untuk melakukan korupsi, karena kultur organisasi yang baik akan membentuk para pelaku organisasi mempunyai *sense of belonging* (rasa ikut memiliki) dan *sense of identity* (rasa bangga sebagai bagian dari suatu organisasi).

H2: Kultur organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud)

Kompensasi adalah salah satu hal yang penting bagi setiap pegawai yang bekerja dalam suatu perusahaan, Bagi seorang pegawai, kompensasi merupakan suatu *outcome* atau *reward* yang penting karena dengan kompensasi yang diperoleh seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

H3: Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud).

Penegakan peraturan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Asshiddiqie, 2008).

H4: Penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud)

Secara konseptual keadilan distributif berkaitan dengan distribusi keadaan dan barang

yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan individu. Kesejahteraan yang dimaksud meliputi aspek-aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial.

H5: Keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud)

Keadilan prosedural merupakan pertimbangan yang dibuat oleh karyawan mengenai keadilan yang dipersepsikan mengenai proses yang dan prosedur organisasi yang digunakan untuk membuat keputusan alokasi dan sumber daya (Ivancevich, 2006).

H6: Keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud)

Steers (1985:50) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi) dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya

H7: Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud)

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di Dinas Kabupaten Klaten. Penelitian yang dilakukan bukanlah penelitian populasi tetapi penelitian sampel, yaitu meneliti beberapa populasi yang mewakili. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan data distribusi sampel sebagai berikut:

Tabel 1.

No	Nama	Kuesioner yang Dibagikan	Kuesioner yang Kembali	Kuesioner yang Tidak Lengkap
1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	15	8	7
2	Dinas Pertanian	20	12	8

3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20	16	4
4	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	15	7	8
5	Dinas Kesehatan	20	13	7
6	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	20	18	2
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	15	10	5
8	Dinas Perhubungan	20	17	3
9	Dinas Pendidikan	20	20	0
10	Dinas Ketahanan Pangan	15	13	2
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumberdaya Mineral	20	16	4
Jumlah		200	150	50

Data Distribusi Sampel Penelitian

Variabel Penelitian

Tabel 2.

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Keterangan	Pengukuran
Kecurangan akuntansi (<i>fraud</i>)	Tindakan-tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan	Skala likert: 1: Sangat tidak setuju 2: Tidak setuju 3: Netral 4: Tidak setuju 5: Sangat setuju
Kultur organisasi	Merupakan nilai-nilai atau norma-norma yang mengarahkan perilaku anggota organisasi dan akan menjadi dasar aturan berperilaku dalam organisasi	Skala likert: 1: Sangat tidak setuju 2: Tidak setuju 3: Netral 4: Tidak setuju 5: Sangat setuju
Kesesuaian Kompensasi	Persepsi karyawan tentang sesuatu yang dipertimbangkan sebagai suatu yang sebanding.	Skala likert: 1: Sangat tidak setuju 2: Tidak setuju 3: Netral 4: Tidak setuju 5: Sangat setuju
Penegakan peraturan	Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang	Skala likert: 1: Sangat tidak setuju 2: Tidak setuju 3: Netral 4: Tidak setuju

	termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut	5: Sangat setuju
Keadilan Distributif	Keadilan yang dipersepsikan mengenai penghargaan dan sumberdaya didistribusikan di seluruh organisasi	Skala likert: 1: Sangat tidak setuju 2: Tidak setuju 3: Netral 4: Tidak setuju 5: Sangat setuju
Keadilan procedural	Pertimbangan yang dibuat oleh karyawan mengenai keadilan yang dipersepsikan mengenai proses dan prosedur organisasi yang digunakan untuk membuat keputusan alokasi dan sumber daya	Skala likert: 1: Sangat tidak setuju 2: Tidak setuju 3: Netral 4: Tidak setuju 5: Sangat setuju
Komitmen organisasi	Penerimaan seseorang terhadap nilai-nilai serta tujuan organisasi.	Skala likert: 1: Sangat tidak setuju 2: Tidak setuju 3: Netral 4: Tidak setuju 5: Sangat setuju

METODE ANALISIS DATA

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan menggunakan *software Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model persamaan struktural (SEM) yang berbasis

komponen atau varian (*variance*). Alat analisis yang digunakan adalah aplikasi *smartPLS 2.0*. Metode analisis yang dilakukan antara lain statistik deskriptif, dan statistik inferensial (uji outer model, uji inner model).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3.
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standart Deviasi
KPI	150	8	25	20.47	3.005
KUO	150	14	25	19.97	2.597
KK	150	7	25	19.33	3.069
PP	150	6	25	19.37	2.753
KD	150	4	25	14.20	2.812
KP	150	7	35	24.86	4.063
KO	150	7	25	19.38	2.429
KKA	150	9	36	19.13	6.419

Sumber : Data diolah, 2015

Dari statistik deskriptif pada Tabel 1 dapat diketahui nilai mean kpi sebesar 20.47 yang berarti bahwa keefektifan pengendalian internal yang diterapkan di sektor pemerintahan di Kabupaten Klaten dalam kondisi atau kategori efektif. Nilai mean kuo sebesar 19.97 yang berarti bahwa kultur organisasi yang diterapkan di sektor pemerintahan di Kabupaten Klaten dalam kondisi atau kategori baik. Nilai mean kk sebesar 19.33 yang berarti bahwa kesesuaian kompensasi yang diterapkan di sektor pemerintahan di Kabupaten Klaten dalam kondisi atau kategori puas. Nilai mean pp sebesar 19.37 yang berarti bahwa penegakan peraturan yang diterapkan di sektor pemerintahan di Kabupaten Klaten dalam kondisi atau kategori efektif. Nilai mean kd

sebesar 14.20 yang berarti bahwa keadilan distributif yang diterapkan di sektor pemerintahan di Kabupaten Klaten dalam kondisi atau kategori cukup adil. Nilai mean kp sebesar 24.86 yang berarti bahwa keadilan prosedural yang diterapkan di sektor pemerintahan di Kabupaten Klaten dalam kondisi atau kategori sangat adil. Nilai mean ko sebesar 19.38 yang berarti bahwa komitmen organisasi yang diterapkan di sektor pemerintahan di Kabupaten Klaten dalam kondisi atau kategori komitmen rendah. Nilai mean kka sebesar 19.13 yang berarti bahwa *fraud* yang terjadi di Kabupaten Klaten dalam kondisi atau kategori jarang terjadi.

Uji Outer Model

Tabel 4.
Overview Hasil

	<i>AVE</i>	<i>Akar AVE</i>	<i>Composite Reliability</i>	<i>R Square</i>	<i>Cronbachs Alpha</i>
KD	0.686976		0.896791		0.871583
KK	0.536084	0.675225	0.851409		0.794221
KKA	0.676450	0.732177	0.949197	0.310303	0.939216
KO	0.522196	0.676716	0.844557		0.775144
KP	0.535365	0.828840	0.887154		0.857882
KPI		0.731686			
KUO	0.455930	0.722631	0.805546		0.703629
PP	0.457945	0.822465	0.807221		0.706699

Sumber : *Output PLS, 2015*

Tabel 5.
Latent Variable Correlations

	KD	KK	KKA	KO	KPI	KUO	PP
KD	1.000000						
KK	0.540112	1.000000					
KKA	-0.203705	-0.350742	1.000000				
KO	0.353420	0.407173	-0.374815	1.000000			
KP	0.542734	0.385744	-0.275265	0.344598			
KPI	0.198952	0.335422	-0.405610	0.190355	1.000000		
KUO	0.430989	0.698561	-0.391593	0.478170	0.317667	1.000000	
PP	0.596464	0.665342	-0.362697	0.417463	0.410576	0.573217	1.000000

Sumber : *Output PLS, 2015*

Uji Convergent Validity

Dalam penelitian ini terdapat 8 variabel yaitu keefektifan pengendalian internal, kultur organisasi, kesesuaian kompensasi, penegakan peraturan, keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi, dan kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan. Pegujian validitas penelitian menggunakan alat bantu hitung yaitu *smartPLS* 2.0. Berdasarkan output pls dapat disimpulkan bahwa dari semua pertanyaan yang diajukan hasilnya **valid**.

Uji Composite Reliability

Dari uji reliabilitas pada Tabel 2 dilihat bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena *composite reliability* dan *cronbach alpha* masing-masing variabel lebih besar dibandingkan nilai standar umum yang dibentuk ,yaitu 0,70.

Uji Discrimant Validity

Berdasarkan Tabel 3 hasil uji *discriminant validity* atau uji korelasi antar variabel menunjukkan nilai akar kuadrat ave setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model pada *correlation of latent variables*, maka dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik.

Uji Inner Model

Berdasarkan Tabel 4 menunjukan bahwa nilai *r-square* kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan fraud (kka) 0.310303. Nilai *r-square* sebesar 0.310303 memiliki arti bahwa variabilitas konstruk kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) dapat di jelaskan oleh variabilitas konstruk keefektifan pengendalian internal (kpi), kultur organisasi (kuo), kesesuaian kompensasi (kk), penegakan peraturan (pp), keadilan distributif (kd), keadilan prosedural (kp), dan komitmen organisasi (ko) sebesar 31 % sedangkan 69% dijelaskan oleh konstruk lain di luar penelitian. Tabel 2. Uji *Reliabilitas*

Tabel 6
Uji *Path Coefficient*

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard (STERR)	Error T (O/STERR)	Statistics
KPI -> KKA	-0.320085	-0.327301	0.032290	0.032290	9.912819	
KUO -> KKA	-0.151369	-0.142510	0.055617	0.055617	2.721648	
KK -> KKA	-0.045907	-0.051298	0.059967	0.059967	0.765546	
PP -> KKA	-0.010982	-0.009854	0.057995	0.057995	0.189355	
KD -> KKA	0.133380	0.125694	0.043749	0.043749	3.048786	
KP -> KKA	-0.197256	-0.192338	0.041457	0.041457	4.758145	
KO -> KKA	-0.197394	-0.202190	0.037039	0.037039	5.329343	

Sumber : *Output PLS*, 2015

Uji Hipotesis

Variabel Keefektifan Pengendalian Internal (KPI) berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar -0.320085 dan nilai *t-statistic* sebesar 9.912819 signifikan pada ($p < 0.05$). Ini

menunjukkan keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud*, dengan demikian h1 dapat **diterima**. Jadi, jika sistem pengendalian internal dalam instansi sudah berjalan efektif, maka kemungkinan kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*)

yang terjadi juga akan semakin kecil. Hasil ini didukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain (2013), Pramudita (2013) dan Najahningrum (2013).

Variabel Kultur Organisasi (KUO) berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar -0,151369 dan nilai *t-statistic* sebesar 2.721648 signifikan pada ($p < 0.05$). Ini menunjukkan kultur organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*), dengan demikian h_2 dapat **diterima**. Jadi, jika semakin tinggi kultur organisasi dalam instansi, maka dapat menekan tingkat terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*). Hasil ini mendukung penelitian Najahningrum (2013) dan Pramudita (2013). Sedangkan hasil yang berbeda diungkapkan oleh Zulkarnain (2013).

Variabel Kesesuaian Kompensasi (KK) berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar -0.045907 dan nilai *t-statistic* sebesar 0.765546 berada dibawah nilai kritis 1,659. Ini menunjukkan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*), dengan demikian h_3 **ditolak**. Jadi, jika semakin tinggi kesesuaian kompensasi dalam instansi, maka tidak dapat menekan tingkat terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*). Hasil yang didapat mendukung temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006) , Fauwzi (2011), Kusumastuti (2012).

Variabel Penegakan Peraturan (PP) berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar -0.010982 dan nilai *t-statistic* sebesar 0.189355 berada dibawah nilai kritis 1,659. Ini menunjukkan penegakan peraturan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*), dengan demikian h_4 **ditolak**. Jadi, jika semakin tinggi penegakan peraturan dalam instansi, maka tidak dapat menekan tingkat terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*). Hasil yang didapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain (2013) dan Kusumastuti (2012).

Variabel Keadilan Distributif (KD) berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar 0.133380 dan nilai *t-statistic* sebesar 3.048786 signifikan pada ($p < 0.05$). Ini menunjukkan keadilan distributif berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*), dengan demikian h_5 **ditolak**. Jadi, jika semakin tinggi keadilan distributif dalam instansi, maka tidak dapat menekan tingkat terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*). Hasil yang didapat berbeda temuan dengan penelitian yang dilakukan oleh Najahningrum (2013).

Variabel Keadilan Prosedural (KP) berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar -0.197256 dan nilai *t-statistic* sebesar 4.758145 signifikan pada ($p < 0.05$). Ini menunjukkan kultur prosedural berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*), dengan demikian h_6 dapat **diterima**. Jadi, jika semakin tinggi keadilan prosedural dalam instansi, maka dapat menekan tingkat terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rae (2008), Puspitadewi & Irwandi (2012), dan Najahningrum (2013).

Variabel Komitmen Organisasi (KO) berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar -0.197394 dan nilai *t-statistic* sebesar 5.329343 signifikan pada ($p < 0.05$). Ini menunjukkan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*), dengan demikian h_7 dapat **diterima**. Jadi, jika semakin tinggi komitmen organisasi dalam instansi, maka dapat menekan tingkat terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pristiyanti (2012) dan Najahningrum (2013).

SIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa terdapat pengaruh negatif antara keefektifan pengendalian internal, kultur

organisasi, keadilan prosedural, dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif antaran keadilan distributif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) disektor pemerintahan, serta tidak terdapat pengaruh antara kesesuaian kompensasi dan penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara secara langsung agar data yang dihasilkan lebih akurat dan responden dapat memahami pertanyaan yang diajukan

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W.S, and Chad Albrecht, 2003. *Fraud Examination & Prevention*. Australia: Thomson, South-Western.
- Cressey Donald R.1953. *Others people money, A study in the social psychology of Embezzlement*. Montclair: Patterson Smith.
- Fauwzi, M.Glifandi Hari. 2011. Analisis Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Manajemen Terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Akuntansi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kusumastuti, Nur Ratri. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai *Variabel Intervening*. Semarang: Universitas Diponegoro.\
- Najahningrum, Anik Fatun. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Fraud*: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY." *Accounting Analysis Journal*2.3 (2013).
- Pramudita, Aditya. "Analisis *Fraud* di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga." *Accounting Analysis Journal* 2.1 (2013).
- Rae, Kirsty, and Nava Subramaniam. "Quality of internal control procedures: Antecedents and moderating effect on organisational justice and employee fraud." *Managerial Auditing Journal* 23.2 (2008): 104-124.
- Sukanto, Eman. "Perbandingan Persepsi Auditor Internal, Akuntan Publik, dan Auditor Pemerintah Terhadap Penugasan *Fraud* Audit dan Profil *Fraud* Auditor." (2009).
- Wilopo. 2006. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Simposium Nasional Akuntansi IX.